

## INTOLERANSI, RADIKALISME DAN TERORISE DI LAMONGAN

Halimur Rosyid, Ahmad Sholikin dan Moh Sa'diyin  
Pengajar FISIPOL Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan  
Jalan Airlangga 3 Sukodadi Lamongan

Email : [akhmad.sholikin@gmail.com](mailto:akhmad.sholikin@gmail.com)

### ABSTRAK

Permasalahan di Indonesia yang terus mengemuka ke dalam ranah publik hingga saat ini adalah Intoleransi, radikalisasi dan terorisme agama. Intoleransi, radikalisasi dan terorisme agama diwujudkan dalam pelarangan kegiatan ibadah keagamaan, penyebaran kebencian, kekerasan berbasis agama ataupun pengrusakan tempat ibadah. Berangkat dari hal tersebut, Penelitian ini mengambil lokasi di Lamongan karena kota ini dikenal sebagai wilayah dengan sekolah-sekolah agama penelusur tokoh-tokoh pelaku terror di Indonesia. Hasil dari Penelitian ini adalah perilaku seseorang dari Intoleransi hingga menjadi terorisme dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ada perbedaan keyakinan, etnik, status sosial ekonomi sebagai gejala awal yang berpotensi menghasilkan gejala toleransi/intoleransi, radikalisme hingga terorisme. Namun perbedaan tersebut didukung oleh adanya kepentingan ekonomi yang berperan menghubungkan perbedaan dengan intoleransi dan radikalisme yang jika semakin menguat nantinya dapat menghasilkan pula terorisme. Disisi lain ada peran kehadiran negara, yang dapat mengurangi atau menguatkan peran kepentingan ekonomi dalam menghasilkan intoleransi, radikalisme dan terorisme. Jika nilai budaya dan praktik sosial yang sejalan dengan toleransi kuat, maka intoleransi dan radikalisme juga dapat dihambat. Sebaliknya, jika nilai budaya dan praktik sosial memfasilitasi dan menguatkan persepsi akan perbedaan dan petentangan kepentingan ekonomi, maka intoleransi, radikalisme hingga terorisme cenderung menguat.

**Kata Kunci : Intoleransi, Radikalisme, Terorisme, Lamongan**

### PENDAHULUAN

Indonesia dalam rentang waktu 10 tahun ini mengindikasikan adanya gejala intoleransi, radikalisme dan terorisme. Terorisme, penyerangan dan pengusiran terhadap kelompok minoritas, pelarangan kegiatan, dan pembakaran buku adalah sebagian bentuk intoleransi dan radikalisme itu. Indonesia masih menyimpan potensi intoleransi dan radikalisme, sebagian dari itu sudah terjadi meski hanya di beberapa daerah, sebagian besarnya bukan tidak mungkin akan muncul ke permukaan secara masif di waktu yang akan datang, jika tidak ditangani secara sungguh-sungguh.

Hasil penelitian survey yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) Jakarta pada tahun 2010 sungguh mengejutkan, sebanyak 48,9% siswa di Jabodetabek menyatakan persetujuannya terhadap aksi radikal.<sup>1</sup> Sejalan dengan yang terjadi ditingkat sekolahan, di beberapa kampus perguruan tinggi umum, kecenderungan mahasiswa untuk mendukung tindakan radikalisme juga sangat tinggi. Hal ini terungkap dalam penelitian tentang Islam Kampus yang melibatkan 2466 sampel mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi ternama di Indonesia. Ketika para mahasiswa ditanya tentang pelaksanaan *amar makruf nahi munkar* dalam bentuk *sweeping* tempat-tempat yang dianggap sumber maksiyat, mereka menjawab sebagai berikut: sekitar 65% (1594 responden) mendukung dilaksanakannya *sweeping* kemaksiyatan, 18% (446 responden) mendukung sekaligus berpartisipasi aktif dalam kegiatan *sweeping*. Sekitar 11% (268 responden) menyatakan tidak mendukung *sweeping*, dan sisanya, 6% (158 responden) tidak memberikan jawabannya. Selanjutnya, mereka yang mendukung *sweeping* beralasan bahwa kegiatan *sweeping* tersebut sebagai bagian dari perintah agama (88%), mendukung *sweeping* karena berpendapat bahwa aparat keamanan tidak mampu menegakkan hukum (4%), dan karena alasan dekadensi moral (8%) (Fadjar dkk, 2007 : 35).

Banyaknya responden yang menganggap kegiatan *sweeping* termasuk perintah agama merupakan sesuatu yang sangat disayangkan. Bahwa Islam melarang kemaksiyatan adalah benar, tetapi Islam sangat menekankan ditempuhnya cara-cara dakwah yang santun baik dalam *amar makruf* maupun *nahi munkar*. Sedangkan kegiatan *sweeping* tempat-tempat kemaksiyatan justru akan melahirkan ketegangan-ketegangan baru dengan mereka yang berada ditempat-tempat tersebut. Misi *nahi munkar* yang sangat mulia, yakni menyadarkan orang dari perbuatan kemaksiyatan berubah menjadi sumber konflik. Pada sisi yang lain, gerakan *sweeping* justru menampakkan wajah “garang” Islam itu sendiri. Bahwa aparat keamanan kurang tanggap dalam memberantas kemaksiyatan dan kejahatan mungkin saja

---

<sup>1</sup> Survey ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2010 sampai dengan Januari 2011, di 10 kota di Jabodetabek. Penelitian ini dilakukan kepada 100 sekolah tingkat SMP dan 100 sekolah tingkat SMA. Penelitian ini menggunakan metode wawancara tatap-muka dengan panduan kuesioner, dan penarikan sampel acak. Batas *error sampling* kurang lebih 3,6 persen untuk guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dan 3,1 persen untuk siswa. Populasi penelitian survey ini adalah guru PAI di SMP dan SMA di Jabodetabek. Jumlah total populasi guru PAI yang diambil sampel adalah 2.639 orang, terdiri dari 1.639 guru PAI SMP dan 800 guru PAI SMA. Dari jumlah populasi diambil sampel 590 guru, di antaranya 327 guru PAI SMP dan 263 guru PAI SMA. Sementara jumlah total sampel siswa yang valid adalah 993 siswa, yang terdiri dari 401 siswa SMP dan 592 SMA. Sumber: [www.swatt-online.com/2017/04/lakip-pemerintah-harus-tinjaukembali-pendidikan-agama-islam/](http://www.swatt-online.com/2017/04/lakip-pemerintah-harus-tinjaukembali-pendidikan-agama-islam/) / di akses 20:30 WIB

benar, tetapi hal itu tidak bisa dimaknai dengan kebolehan warga sipil untuk mengambil alih tugas aparat.

Fenomena kekerasan atas nama agama yang sering dikenal dengan radikalisme agama semakin tampak garang ketika muncul berbagai peristiwa teror pemboman di tanah air. Beberapa peristiwa teror dalam bentuk pengeboman telah memakan banyak korban dan berdampak luas terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Setidaknya telah terjadi lebih dari 20 kali peristiwa pemboman sejak tahun 2000 sampai sekarang.<sup>2</sup> Jaringan terorisme terus bekerja dan perekrutan orang baru untuk menjalankan aksi teror masih berlangsung, meski tokoh-tokoh utama pelaku teror sudah ditahan.

Berbagai hal ini sejalan dengan temuan Wahid Foundation dalam laporannya tahun 2014, ditemukan bahwa dari 230 organisasi yang telah berdiri sejak zaman Orde Lama, 147 diidentifikasi sebagai organisasi intoleran, 49 organisasi memiliki kecenderungan pada radikalisme, dan 34 organisasi terindikasi sebagai kelompok teror. Jejaring kelompok radikal ini memiliki basis dukungan yang cukup kuat di Indonesia dan setidaknya, tiga dari 49 kelompok radikal tadi secara terbuka mencari pendanaan internasional. Meski demikian, kebanyakan dari organisasi radikal ini hanya memiliki sedikit dukungan di kawasan dan 63% diantaranya hanya eksis di tingkat lokal pada provinsi tertentu.

Penelitian ini mengambil lokasi di Lamongan karena kota ini menyumbang banyak sekali tokoh-tokoh terorisme yang ada di Indonesia. Mengutip laporan IPAC (*Institute for Policy Analysis of Conflict*) soal Jaringan Lamongan, kota ini dikenal sebagai wilayah dengan sekolah-sekolah agama penelur tokoh teror. Analisis yang dilakukan terhadap hubungan tokoh-tokoh di Lamongan menunjukkan jaringan alumni pesantren Al Islam dan sekolah lainnya pernah berhubungan dengan organisasi Jamaah Islamiyah. Walaupun tokoh-tokoh ini bukan atau dalam beberapa kasus, bukan lagi anggota JI, sekolah-sekolah ini tetap menjadi komponen penting untuk komunitas ekstremis setelah JI sendiri sudah berhenti, setidaknya sementara, melakukan kekerasan.

**Tabel 1. Teroris Asal Kabupaten Lamongan**

No.	Nama	Alamat	Kasus
1.	Amrozi, Ali Ghufron dan Ali Imron	Tenggulun Kec Solokuro	Bom Bali 1, Terjadi pada tanggal 12 oktober 2002
2.	Zainul Arifin	Kec. Paciran	Bom bunuh diri Poso 3 Juni 2013
3.	Iwan	Kel Jetis Kec	Ditangkap Densus 88 pada tanggal 15 Agustus 2013, Diduga

<sup>2</sup> Dalam Terorisme di Indonesia, [http://id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme\\_di\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme_di_Indonesia), diakses 20/04/2017, 20:39 WIB

		Lamongan.	bagian dari Jaringan Teroris internasional Al Qaida.
4.	Toni Saronggallo	Desa Kentong Kecamatan Glagah	Ditangkap Densus 88 pada tanggal 22 Desember 2014, Jaringan Dul Matin, Perencana Bom Bali 1. Menurut piak kepolisian yang bersangkutan masih aktif dalam Jaringan terorisme tersebut.
5.	Fadlan Muholat	Solokuro	Tewas di Iraq tahun 2015, Diberitakan tewas di Iraq dan diberitakan oleh media bahwa masih banyak warga Lamongan lainnya yang tergabung ISIS baik berada di luar negeri maupun dalam negeri.
6.	Edy Darwanto	Kec Paciran	Menyimpan bendera ISIS, ditangkap 9 Agustus 2014, Ditemukan bendera, buku, buklet, CD dan lainnya di rumah terduga namun segera di lepas oleh pihak kepolisian dengan alasan tidak terbukti terkait kelompok teroris.
7.	Ririn, istri dari Ahsanul Huda, 40 tahun.	Desa Kandangsemangk on Kecamatan Blimbing	Ditangkap saat menyeberang ke Suriah melalui Turki bersama 17 Oranng WNI lainnya. Ia mengajak ketujuh anaknya. Diberitakan media pada 15 Maret 2015. Istri dari pria yang terdeteksi ada di Turki pada pertengahan Ramadan 2014.
8.	Tiara Nurmayanti, istri dari Mohammad Hidayah	Jl Raya Deandles Kampung Gowak Kel Blimbing Kec Blimbing.	Bersama Ririn ditangkap saat menyeberang ke Suriah melalui Turki bersama 17 Oranng WNI lainnya. Ia mengajak seorang anak berusia 2,5 tahun. Diberitakan media pada 15 maret 2015. Istri dari , terduga teroris yang meninggal dalam penggerebekan di Tulungagung oleh Detasemen Khusus 88 pada 22 Juli 2013.
9.	Zainal Anshori, Hendis Efendi, dan Hasan.	Kelurahan Blimbing, Kec. Paciran	Anggota jaringan Jamaah Ansharut Daulah yang dipimpin Aman Abdurrahman. Diberitakan Jumat, 7 April 2017.
10.	Siswanto	Pengajar pondok pesantren Al Islam, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan	Siswanto tewas setelah bergabung dengan ISIS di Suriah. Istri Siswanto yang selamat, dideportasi dari Turki, pada 2015 lalu. Siswanto adalah salah satu tokoh penting di Lamongan. Alumni Pesantren Al-Mukmin Ngruki, Solo ini menjadi pengajar di pesantren dan bergabung dengan JI pada 1993. Pada 2000 silam, Siswanto pergi ke Poso untuk mendukung dakwah JI sebelum pindah ke Magetan dan kembali ke Lamongan, enam tahun setelahnya.
11.	Wildan Mukhollad	Desa Payaman, Kec. Solokuro, Kab. Lamongan	salah satu warga Indonesia pertama yang tewas di Suriah karena membela ISIS. Dia adalah pelaku bom bunuh diri Februari 2014.
12.	Hendro, Mohammad Hidayat dan Salim Mubarak Attamimi alias Abu Jandal.	Santri lulusan Al- Islam, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan	Kelompok pendukung ISIS di Indonesia serta mendukung Santoso di Poso. Sebanyak 100 pria telah melalui pelatihan militer kelompok Santoso di Poso sejak akhir 2010 silam. Ketiga tokoh tersebut adalah bagian dari 100 pria tersebut.
13.	7 warga Lamongan berangkat ke Timur Tengah untuk bergabung dengan ISIS	Lamongan	Data Badan Intelijen Indonesia yang menyebut ada 7 warga Lamongan berangkat ke Timur Tengah untuk bergabung dengan ISIS, dibenarkan oleh Kapolres Lamongan AKBP Solekan SIK. Bahkan, diindikasikan jumlahnya tak hanya tujuh. "Tidak hanya tujuh namun banyak warga Lamongan, yang saat ini dalam perjalanan maupun sudah berada di sana. Diberitakan Jumat, 08 Agustus 2014.

Sumber : Diolah dari berbagai media, 2017

Pada edisi Februari 2016, majalah TIME mengungkap fakta, bahwa saat di dalam penjara para narapidana terorisme masih bisa memanfaatkan media sosial bukan saja untuk menjalankan gerakan klandestinnnya, melainkan juga untuk menyebarluaskan paham mereka,

sekaligus merekrut anggota baru. Mereka juga mampu untuk menularkan paham radikal mereka pada narapidana lain, yang tidak terkait dengan kasus terorisme sama sekali. Di antara mereka ada, yang saat keluar dari penjara, tetap bertahan dengan paham radikal tersebut dan bahkan menjadi lebih berpengaruh dalam lingkaran kelompok-kelompok radikal di Indonesia. Terungkap pula bahwa, ada indikasi penyebaran paham-paham intoleran di kalangan siswa sekolah menengah umum dan perguruan tinggi negeri, yang menyamakan gerakan mereka sebagai kelompok studi yang mendorong pemurnian-agama.

Riset ini berusaha untuk menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana toleransi/intoleransi dan radikalisme bekerja sehingga sampai kepada perilaku terorisme di Kabupaten Lamongan? Dan bagaimana mencegah atau mengurangi intoleransi dan radikalisme supaya tidak mengarah kepada terorisme di Kabupaten Lamongan? Sehingga bisa memahami fenomena toleransi/intoleransi dan radikalisme, serta menggali potensi dan sumber terjadinya perilaku terorisme, dengan cara mengidentifikasi faktor-faktornya, serta menjelaskan dinamika hubungan antar faktor yang berperan dalam memunculkan gejala intoleransi, radikalisme dan terorisme. Riset ini tidak terbatas hanya pada intoleransi, radikalisme dan terorisme terkait agama, meski beberapa gejala yang diteliti tampak memiliki kaitan dengan agama. Faktor-faktor yang dilacak dan diteliti mencakup faktor demografis, ekonomi, politik, budaya dan struktural yang tercakup dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Dengan menelusuri beberapa peristiwa, yang mengindikasikan intoleransi, radikalisme dan terorisme. Riset ini diharapkan dapat menghasilkan pelajaran mengenai seluk-beluk gejala intoleransi, radikalisme dan terorisme serta menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative methods*) yang mengacu pada berbagai teknik dalam penelitian; penelitian partisipatif, wawancara intensif secara personal, proses observasi serta *focus group discussion* (FGD) guna memahami pengalaman-pengalaman dari para informan utama, serta kita dapat menemukan sikap tegas dari para informan tersebut (Marsh and Stoker, 2002 : 197).

Penelitian ini menggunakan *grounded theory* sebagai disain penelitian, dengan beberapa alasan: *Pertama*, penelitian tentang intoleransi, radikalisme dan terorisme ini berkaitan, dengan proses sosial atau aksi sosial, dengan penekanan pada pertanyaan: apa yang

terjadi dan bagaimana orang-orang saling berhubungan satu sama lain, sehingga menghasilkan kecenderungan intoleran dan radikal serta menuju tindakan terorisme. *Kedua*, penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan dan mengembangkan suatu teori, yang menjelaskan tentang intoleransi, radikalisme dan terorisme, yang menjadi *concern* dan perhatian banyak orang. *Ketiga*, sebagai metode yang menekankan penemuan dan pengembangan teori dari data empirik di lapangan, *grounded theory* atau *grounded research* dianggap memadai, untuk dijadikan sebagai alat dalam menjelaskan intoleransi, radikalisme dan terorisme pada orang-orang, yang pernah menampilkan perilaku intoleran dan radikal, serta mereka yang pernah terlibat dalam peristiwa yang mengindikasikan intoleransi dan radikalisme.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang mengkaji fenomena Intoleransi, Radikalisme dan Terorisme dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu untuk mendapatkan data lapangan, peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Lamongan yang banyak menyumbang para tokoh terorisme yang ada di Indonesia. Metode pengumpulan data secara kualitatif, yang dilengkapi dengan studi literatur dan observasi situasi lapangan. Mengingat bertujuan menggali pengalaman nyata dan menangkap makna, yang sebenarnya tercipta di lapangan penelitian melalui interaksi langsung antara peneliti dan yang diteliti, maka perlu untuk memastikan, bahwa temuan-temuan dalam studi ini benar-benar mencerminkan situasi obyek penelitian (*valid*) dan cenderung memiliki konsistensi.

## **INTOLERANSI, RADIKALISME DAN TERORISME DI JAWA TIMUR PASCA-REFORMASI**

Hingga saat ini, tidak sedikit orang yang masih gamang melihat masa depan Indonesia. Tidak jarang terdengar suara sumbang yang mempertanyakan apakah Indonesia sedang berjalan ke arah sebuah negara demokratis ataukah sebaliknya. Pesimisme ini tidak bisa diabaikan begitu saja, jika kita melihat berbagai peristiwa yang mengikuti Reformasi politik '98. Kekerasan dengan motif agama dan etnis merupakan fenomena mencolok yang menandai kehidupan sosial-politik keagamaan di Indonesia pasca-Soeharto (Suaedy, 2007 : 343). Jika satu wajah Reformasi ditunjukkan melalui tuntutan yang sangat kuat terhadap keterbukaan dan demokrasi, maka proses demokratisasi ini sejak dini telah mendapati dirinya berhadapan dengan ancaman yang serius, berupa konflik etnis dan agama (Sukma, 2005 : 1). Bisa dikatakan, pada saat yang masih sangat dini pasca-Reformasi, kekuatan demokratik

telah menemukan dirinya bukanlah kekuatan dominan dalam peta politik Indonesia baru (Hefner, 2005).

Situasi politik Indonesia pasca-Reformasi tidak hanya dipenuhi dengan persaingan antara kelompok pro-demokrasi dengan sisa-sisa kekuatan politik rejim Orde Baru, tapi juga antara kelompok pro-demokrasi dengan kekuatan-kekuatan keagamaan dan etnis yang ingin mengambil untung dari situasi yang ada. Tidak ada yang menduga, bahwa *chaos* politik yang diakibatkan Reformasi melahirkan banyak kekerasan dengan jargon agama. Jika kekerasan komunal yang dipantik oleh sentimen agama dan etnis ini tidak bisa dipecahkan, tidak menutup kemungkinan, bahwa transisi demokrasi akan mengarah kepada otoritarianisme baru. Tuntutan implementasi syariat Islam oleh kalangan Islamis, misalnya, adalah suara lantang yang ingin menguasai ruang publik, dengan memanfaatkan nalar dan instrumen demokrasi yang baru seumur jagung ini, yang potensial untuk membalik arah demokrasi yang sedang dibangun. Misalnya, pada Agustus 2000, ribuan umat Islam datang ke Yogyakarta menghadiri Kongres Mujahidin untuk membentuk MMI (Majelis Mujahidin Indonesia). Dalam pidato sambutannya, Abu Bakar Ba'asyir, tokoh sentral gerakan ini, mengatakan bahwa hanya ada dua pilihan bagi umat Islam dalam rangka menegakkan syariat Islam di Indonesia: terlaksananya syariat Islam atau "kami akan mati sebagai sebagai seorang mujahid (Ba'asyir, 2001 : 139)."

Demokrasi juga dianggap sebagai halangan bagi pelaksanaan syariat Islam. Sebagaimana tercatat dalam rekomendasi Kongres Mujahidin, "Menolak demokrasi, republik, sistem dan bentuk pemerintahan yang merupakan produk doktrin kaum kafir, dan menyerukan kaum Muslim untuk menghidupkan kembali sistem pemerintahan *syura* dan bentuk negara khilafah (Awwas, 2001 : 158)." Lebih dari itu, jika selama ini Indonesia bangga sebagai pemeluk Islam terbesar di dunia dan menjadi kiblat dari kehidupan keislaman yang moderat, maka pasca-reformasi, radikalisme menjadi salah satu wajah Islam Indonesia. Bahkan, Indonesia telah menjadi bagian dari jaringan terorisme internasional. Sejak tahun 2000, berbagai bom meledak di beberapa wilayah Indonesia. Bom Bali 2002 yang membunuh ratusan orang, dan bom Mariot Jakarta 2003 yang membunuh belasan orang, semakin meyakinkan kesan, bahwa Indonesia telah masuk ke dalam front peperangan jaringan teroris internasional. Dari tahun 2008 sampai 2013, setidaknya ada lima kali kejadian bom bunuh diri yang dilakukan oleh orang-orang dari kelompok Muslim radikal (Hefner, 2005 : 274). Ketika pada pertengahan tahun 2014 dunia dibuat *shock* dengan berdirinya ISIS (*Islamic*

*State on Iraq and Siria*), Indonesia yang telah menjadi bagian dari jaringan terorisme global juga mau tidak mau mendapat imbas dari fenomena ini.

Banyak Muslim Indonesia yang terang-terangan mendukung ISIS, bahkan terlibat dalam peperangan ISIS di Siria. Sebuah studi yang hendak mengukur efektifitas (dan kemungkinan kegagalan) gerakan demokrasi di Indonesia pasca-reformasi menyebutkan bahwa di negara plural seperti Indonesia, di mana sebagian besar persaingan politik didasari oleh sentiment etnis dan agama, maka luas partisipasi yang dibangun oleh satu kekuatan politik sangat potensial mengarah pada penciptaan pemerintahan terdesentralisasi yang nondemokratis. Ini bisa menjadi sisi gelap Reformasi politik Indonesia, di mana proses transisi tidak mengarah kepada terlembaganya demokrasi secara kokoh. Akan tetapi, tetap harus dipertimbangan keberadaan aktor-aktor prodemokrasi yang memiliki komitmen untuk tetap mencari alternatif, bahkan ketika jalan politik tampak buntu. Bahkan ketika konsosiasionalisme dipraktikkan, para aktor demokrasi tetap memiliki keinginan untuk melampaui golongan etnis dan agama dengan cara menahan gelombang dan mempromosikan bentuk-bentuk lain organisasi sosial politik (Prasetyo, Priyono & Torrnuquist, 2003 : xii-xiii).

Dalam era transisi demokrasi, keberadaan aktor-aktor prodemokrasi memegang peranan penting dalam menjaga menguatnya *religio/ethnio-nationalism*. Jawa Timur sendiri bukanlah wilayah yang kedap dari kekerasan berbasis agama. Memang, selama ini Jawa Timur dianggap memiliki catatan rendah dalam hal kekerasan agama. Dari perspektif tertentu, penilaian ini bisa diterima. Dalam kasus Ahmadiyah, misalnya, Jawa Timur bisa dianggap sebagai wilayah surga jika dibandingkan dengan Jawa Barat.<sup>3</sup> Akan tetapi, asumsi ini segera memudar jika kita melihat nilai indeks demokrasi Jawa Timur, di mana sebagian indikasinya adalah kebebasan sipil dan politik serta pelembagaan demokrasi. Sampai tahun 2013, indeks demokrasi Jawa Timur tercatat buruk (59,32), sedang di 2014, nilai ini meningkat hanya ke level sedang (70,36) (BPS Jawa Timur, 2015).

Penelitian CMARs selama tahun 2009 memperlihatkan bahwa di setiap saat dan waktu, Jawa Timur menyimpan potensi untuk meledak menjadi ketegangan dan konflik keagamaan yang terbuka. Laporan tersebut menyatakan kepada kita bahwa tuduhan sesat sangat mudah keluar untuk siapa saja yang dianggap berbeda. Sepanjang tahun 2010,

---

<sup>3</sup> Pada 28 Februari 2011, Gubernur Jawa Timur mengeluarkan SK Larangan Aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Jawa Timur. Banyak pihak yang kaget dengan keluarnya SK tersebut. Rata-rata, kekagetan itu justru dikarenakan selama ini komunitas Ahmadiyah di Jawa Timur dapat melakukan aktifitasnya dengan aman tanpa ada gangguan. Tidak ada catatan kekerasan yang dialami oleh komunitas Ahmadiyah di Jawa Timur.

ancaman terhadap kebebasan beragama (tuduhan sesat dan penodaan agama), kekerasan berbasis agama, perusakan tempat ibadah, fatwa-fatwa keagamaan bermasalah, dan regulasi diskriminatif secara mudah bisa ditemukan (Tim CMARs, 2010). Tahun 2011, Gubernur Jawa Timur mengeluarkan regulasi diskriminatif berupa Surat Keputusan (SK) No. 188/94/KPTS/013/2011, tentang Pelarangan Aktivitas Ahmadiyah Jawa Timur. Yang paling fenomenal tentu saja adalah ledakan kekerasan terhadap komunitas Syiah di Sampang pada tahun 2012 (Hamdi, 2012 : 218). Kekerasan ini justru direspon oleh Gubernur Jawa Timur dengan mengeluarkan satu lagi regulasi diskriminatif, yaitu Peraturan Gubernur (Pergub) No. 55 tahun 2012, tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur.

## LAMONGAN DAN TERORISME

Indonesia sebagai salah satu negara yang dihuni oleh penduduk dengan mayoritas beragama Islam, menjadi sasaran sempurna dalam diskursus tindakan terorisme ini. Wacana tentang banyaknya jaringan dan gerakan Islam fundamental yang tumbuh dan berkembang di Indonesia menjadi salah satu indikator tersendiri dari tuduhan-tuduhan tersebut. Sikap dan tuduhan yang ditujukan kepada para penganut agama Islam ini sendiri bukan tanpa preseden.

Aksi terorisme berdalih agama adalah yang paling banyak terjadi di Indonesia dalam kurun satu setengah dekade terakhir. Tercatat kejadian mulai dari pengeboman yang terjadi di kedutaan besar Filipina di Jakarta pada 1 Agustus tahun 2000, Bom Bali I yang meledak di Paddy's club pada 12 Oktober 2002 yang menyebabkan 202 jiwa melayang yang mayoritas berkewarganegaraan Australia. Aksi teror ini juga diikuti dengan teror-teror lainnya di tahun-tahun berikutnya, baik di Ibukota Jakarta seperti di Kedutaan besar Australia pada 9 September 2004, Hotel JW Marriot dan Ritz Charlton 17 Juli 2009, ataupun di daerah lainnya seperti Gereja Immanuel di Palu, Sulawesi Tengah pada 12 Desember 2004 dan Nyoman Kafe di Jimbaran Bali pada 1 Oktober 2005. Semua jejak rekam kasus pengeboman yang pernah terjadi di Indonesia tersebut menjadikan terorisme ini menjadi satu diskursus yang hangat di Indonesia, sekaligus menjadi *stereotype* bahwa Indonesia sebagai salah satu negara yang menjadi sarang perkembangan dan aksi terorisme (Akaha AZ 2002:43-49).

John Horgan menyatakan bahwa terjadi perubahan seorang atau sekelompok teroris dari orientasi kekerasan menuju non kekerasan karena transisi politik. Pada tahap berbeda mereka bisa kembali menjadi lebih radikal pada saat munculnya *pulling factor* solidaritas

global atas adanya diskriminasi atau sebaliknya kekuatan kelompok transnasional dunia yang menguatkan ide, gagasan dan gerakan teroris di wilayah lain (Horgan, 2008). Radikalisme dan ekstrimisme terjadi pada semua agama dan kelompok nasionalis. Gerakan teroris berkembang melalui peran aktor-aktor intelektual yang memberi landasan pemikiran strategis dan taktis dalam pergerakan teroris. Beberapa peristiwa pengeboman dan serangan terorisme di Indonesia dilakukan atas stimulasi dan pengaruh *guidance* dari para komandan teroris baik dilakukan secara tertutup melalui pengajian maupun terbuka melalui penerbitan, publikasi dan tulisan pendek di media online, *blogging* dan sosial media.

Penyerangan Thamrin Jakarta pada Januari 2016 adalah diantara aksi yang mendapat pengaruh kuat dari posting tulisan dari para komandan para pelaku. Adalah Bahrin Naim dan Aman Abdurrahman, dua tokoh ISIS Indonesia yang memengaruhi para pelaku dalam menjalankan aksi terorismenya. Para pelaku terpengaruh pada pemikiran Jihad, dan menjalankan instruksi yang dipublikasikan melalui media online dan media sosial. Pemikiran elit jihadis dan teroris berpengaruh kuat atas perkembangan dan pergerakan teroris. Kontra narasi dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sipil untuk membendung deras arus informasi radikal yang secara progresif dilakukan oleh ISIS. Pada tahap lebih kuat dan mengakar Jama'ah Islamiyah (JI) dan kelompok yang berafiliasi dengan Al-Qaidah telah melakukan pengaruh intelektual dan pemikiran ideologi jihadis melalui lembaga pendidikan, publikasi dan media yang lebih lama mereka kembangkan.

Sekitar tiga puluh sekolah yang berafiliasi dengan JI yang tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jabodetabek, dan Indonesia Timur menjadi *breeding grown* efektif yang melahirkan generasi penerus jihadis (Magouirk dan Atran, 2008). Diantara mereka kemudian berafiliasi dengan ISIS, bahkan telah menjadi pelaku bom bunuh diri di Suriah. Wildan Mukhollad (lahir 6 Januari 1995) adalah salah satu mantan siswa di Pesantren Al-Islam Lamongan yang mendaftarkan sebagai sukarelawan bom bunuh diri ISIS di Suriah dan Irak. Wildan dipaksa orang tuanya untuk pindah dari Al-Islam Lamongan ke Al Azhar Mesir sekitar 2011 dengan tujuan untuk mengurangi ideologi jihadis yang dipelajari oleh Wildan di Pesantren Al-Islam, tetapi Wildan menunjukkan respon lebih keras (Asad, 2014). Ketika ke Mesir, Wildan memiliki pemikiran dan peran lebih radikal dengan meninggalkan bangku sekolah dan bergabung dalam medan perang di Suriah melawan rejim Bashar Al-Asad. Pada pertengahan 2012 Wildan berangkat ke Aleppo bergabung dengan kelompok jihadis. Ketika Al-Baghdadi mendeklarasikan diri menjadi Khalifah, Wildan termasuk diantara yang

bergabung. Pada awal Februari 2014 menyeberang ke Irak untuk menjadi pelaku bom bunuh diri ISIS. Di Irak, Wildan dikenal dengan nama Abu Bakar Al-Muhajir Al-Wildan Mukhollad bin Lasmin (Damanik, 2014).

## KONSTRUKSI IDENTITAS TERORISME DI LAMONGAN

Tindakan terorisme dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini menjadi salah satu ancaman bagi masyarakat dunia. Banyak peristiwa tercatat dan terekam dalam ingatan warga dunia tentang berbagai tindakan terorisme ini. Tindakan terorisme sendiri sering dialamatkan kepada mereka, sekelompok warga negara yang pada umumnya secara ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum, berada dalam posisi minoritas dan tidak mendapatkan keadilan dari negaranya, sehingga mencoba melakukan suatu perlawanan dengan jalan kekerasan yang mereka pilih dengan tujuan segera direspon dan didengar oleh subyek yang menjadi sasaran utama mereka.

Amrozi, dalam buku terakhir yang masih sempat ditulisnya, diceritakan bahwa menurutnya tidak ada yang perlu ditakuti dan tidak ada batas toleransi untuk setiap masyarakat yang secara sengaja menunjukkan *kejahiliannya* dalam melakukan berbagai tindakan musyrik tersebut. Kedua orang tua Amrozi dan Ali Ghufron sendiri dan saudara-saudara yang lain, juga selalu dibiasakan untuk terus menempatkan urusan agama pada prioritas utama, baik dalam amalan harian (*amaliah yaumiyah*) sampai pada amalan-amalan lain yang sifatnya akan merusak dan menghancurkan Islam, maka tidak ada yang lebih baik untuk bisa dilakukan guna membela agamanya, selain dengan menggunakan cara kekerasan, jika sebelumnya teguran berupa lisan dan contoh tindakan yang benar tidak juga didengarkan atau diabaikan. Keberadaan dan dukungan orang tua terlihat cukup mendominasi dalam alasan-alasan dan berbagai faktor yang menjadi dasar terbentuknya perilaku “keras” oleh Amrozi tersebut atas urusan agama, sebagaimana pernyataannya tentang sosok dan peran seorang Nur Hasyim, dalam buku biografinya berikut ini;

*“...yang saya ketahui tentang ayah adalah bahwa beliau seorang yang taat beragama, mulai dari masalah yang kecil sampai masalah yang besar. Hal ini yang saya ketahui karena beliau sangat menekankan kepada anak-anaknya dalam masalah ibadah; seperti sholat, membaca Al-Qur’an dan shoum. Dan beliau juga menekankan kepada anak-anaknya untuk senantiasa menyambung silaturrahim kepada saudara-saudara, kaum kerabat, handai taulan dan juga kepada orang-orang sholih. Oleh karena itu beliau akan merasa sedih jika mendapati anaknya tidak berakhlak mulia kepada orang lain.”* (Ulfiyatin, 2015 : 73)

Pernyataan diatas memperlihatkan bagaimana proses penanaman nilai-nilai agama mulai dan terus dilakukan oleh kedua orang tua kepada anak agar terus mengutamakan pengamalan berbagai ajaran dan syariat agama Islam. Informan juga sempat menceritakan bagaimana kesan lain yang diingatnya dari seorang ayah yang dibanggakannya tersebut;

*“...ayah juga sering bercerita kepada saya tentang perjuangannya dalam melawan kaum penjajah kafir Belanda dalam rangka membela kemerdekaan. Lebih dari itu beliau juga mencita-citakan tegaknya syari'at Islam di Negara Republik Indonesia. Ayah saya mungkin dilahirkan ditengah-tengah keluarga yang paham keagamaannya mengikuti paham Nahdlatul Ulama' (NU). Meskipun demikian, beliau sangat tegas dan tidak kompromi dengan segala bentuk syirik, sebagaimana dalam prinsip paham Muhammadiyah. Contohnya Takhayul, bid'ah dan khurofat. Ayah sangat anti dengan acara yasinan di kuburan, haul-haulan, jum'at wage-an, peringatan kematian, majelis kadiran, qunut shubuh, atau tarawih 23 rakaat. Beliau juga tidak mau menyentuh makanan yang berasal dari selamatan kematian. Bahkan beliau tidak mau bermakmum di belakang imam yang menurut beliau ahli bid'ah, kecuali sholat Jum'at...”(Ulfiyatin, 2015 : 74)*

Terkait adanya anggapan yang mengarah pada adanya semacam *labeling* yang diarahkan kepada saudara-saudaranya sebagai seorang teroris, maka AB memiliki jawabannya sendiri. Diakuinya pengertian dari terorisme sendiri menurut AB adalah sebuah tindakan yang sifatnya mengandung unsur menakut-nakuti baik dengan menggunakan lisan atau ancaman saja atau juga dengan cara menggunakan kekerasan, dan apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya dengan melakukan aksi pengeboman di tempat umum, yaitu dilakukan di sebuah tempat hiburan malam yang terletak di daerah Kuta-Bali, adalah suatu tindakan yang sifatnya juga membuat panik dan menakut-nakuti warga, karena kebetulan bom yang menjadi sarana aksi jihad tersebut adalah sesuatu yang berbahaya, maka tentu saja kemudian apa yang dilakukan oleh Amrozi dkk. digolongkan juga sebagai sebetulnya aksi terorisme. Poin paling penting dalam pernyataan AB ini adalah pada pendapatnya tentang apa yang selama ini memang dirasakan dan dipahaminya sebagai sebuah refleksi pembentukan makna atas dirinya dan keluarga yang telah di *label* sebagai bagian dari keluarga teroris, sebagaimana secara ringkas dinyatakannya berikut ini:

*“ Terkait dengan keadaan, kami tidak mereka ada perasaan..perasaan.. terisolir dari perilaku masyarakat, karena kepergian atau peristiwa yang menimpa keluarga. Bahkan, bahkan ada perasaan bangga! Dan itu terbukti karena.. itu hal yang memang, menurut saya itu rohmat Allah. Secara.. secara tiba-tiba, harkat dan martabat yang diberikan kepada keluarga.. betul-betul kami rasakan. Sampai.. mudah-mudahan itu menjadi sebuah.. buah dari pada perilaku-perilaku yang menurut Allah itu dinilai benar! sehingga imbasnya itu kepada keluarga. Untuk tidak malah..*

*apa ya..? tidak didudukkan dalam status yang rendah malah terangkat. Bahkan kalau saya ketika kumpul-kumpul di komunitas.. ya.. teman-teman organisasi sosial keagamaan maupun ditingkat birokrasi, itu.. malah.. apa ya..? e.. ya malah di.. "uwongke". di "wongno" begitu. " (Ulfiyatin, 2015 : 74)*

Jadi makna yang kemudian muncul dan dimiliki oleh AB sebagai salah satu bagian dari keluarga teroris ini, justru sebuah rasa "kebanggaan" tersendiri yang dimilikinya dan juga keluarganya. AS sadar benar ketika memutuskan untuk menikah dengan Amrozi, menjadi istri dan sekaligus pendamping hidup dari seorang *mujahid* memang akan sangat berbeda dengan peran istri pada umumnya. Dimana dalam prinsip kehidupan mereka, istri tidak hanya sebagai partner dalam mengurus dan membina rumah tangganya saja, lebih dari itu seorang istri *mujahid* harus mampu menjadi "penyokong" semangat suaminya untuk terus berjihad di jalan-Nya. Mampu menjaga dirinya dan mewakili suaminya memimpin rumah tangganya yang sewaktu-waktu ditinggal oleh suami ke medan *jihad*. Sebagaimana yang juga disampaikan AS secara formal dalam kata pengantar yang dipersembahkannya untuk buku yang ditulis oleh almarhum suaminya berikut ini:

*" Tarbiyah yang kami pahami dan yakini bahwa perjalanan hidup seseorang muslim terlebih seorang mujahid pasti mempunyai konsekuensi tersendiri dan itu adalah sunnatullah. Maka ketika terjadi resi ko apapun pada keluarga kami dan itu disebabkan oleh sebuah kebenaran yang kami amalkan, tidak sepatasnya kami sebagai istri untuk berkeluh kesah, menghujat orang lain apalagi menghujat Allah, karena semua itu akan mewujudkan kami seorang istri yang tidak sabar, tidak ridlo terhadap taqdir Allah yang pada akhirnya menghapuskan semua jaza' (pahala) yang selalu kami idam-idamkan." (Ulfiyatin, 2015 : 75)*

## **DARI INTOLERAN DAN RADIKALISME HINGGA MENJADI TERORISME**

### ***Nilai Budaya dan Praktik Sosial***

Di lapisan dasar, nilai budaya dan praktik sosial berperan dalam menghasilkan kecenderungan toleran/intoleran dan radikal. Praktik toleransi/intoleransi dan radikalisme terkait dengan nilai dan praktik sosial yang ada di masyarakat. Apa yang diyakini oleh individu-individu di masyarakat dapat dipahami sebagai representasi sosial, sebagai ide dan keyakinan yang ada di masyarakat, yang diinternalisasi oleh individu. Representasi sosial adalah sekumpulan nilai, ide, metafora, keyakinan, dan praktik yang dibagi bersama di antara anggota kelompok dan komunitas (Moscovici, 1973).

Representasi sosial itu memungkinkan orang-orang dalam satu kelompok atau komunitas berbicara satu sama lain dan bertindak bersama serta saling berinteraksi. Itu menjadi seperangkat pengertian bersama dan memandu praktik sosial. Sistem nilai, ide dan praktik itu memiliki dua fungsi. *Pertama*, menegakkan keteraturan yang akan memampukan individu mengorientasikan dirinya dalam dunia material dan sosial, serta memampukannya melakukan penyesuaian diri dan penanganan lingkungan. *Kedua*, memungkinkan komunikasi mengenai beragam aspek dunia, individu dan kelompok berlangsung di antara anggota komunitas dengan menyediakan bagi peserta komunikasi kode untuk pertukaran sosial, penamaan dan klasifikasi secara jelas. Makna dikreasi melalui sistem negosiasi sosial ketimbang hal yang sudah ajek dan terdefinisikan. Penafsirannya mensyaratkan pengertian atas aspek tambahan dari lingkungan sosial.

### ***Kondisi Perekonomian***

Di lapisan berikutnya, kondisi perekonomian berperan dalam menghasilkan kecenderungan toleran/intoleran dan radikal. Kondisi perekonomian yang meleluaskan warga mengambil peranan dan memperoleh sumber daya memadai atau relatif merata, disertai ketimpangan ekonomi relatif rendah, mencegah timbulnya kecenderungan intoleransi dan radikalisme.

### ***Keragaman Sumber Norma***

Di lapisan berikutnya ditemukan faktor keragaman sumber norma ikut berperan dalam kecenderungan toleransi/intoleransi dan radikalisme. Masyarakat yang hanya berpegang pada satu atau sedikit sumber norma menampilkan kecenderungan intoleran yang lebih tinggi, dari pada masyarakat yang mengandalkan banyak sumber norma. Namun perlu ditegaskan pula, beragam sumber norma itu harus memiliki hubungan positif atau kesesuaian antara satu dan lainnya, jika tidak maka bisa terjadi kebingungan pada warganya, untuk mengikuti norma yang mana dalam kehidupannya sehari-hari.

### ***Pengaruh Tokoh Signifikan***

Di lapisan berikutnya, faktor pengaruh tokoh yang signifikan dan dianggap penting oleh warga turut berperan terhadap kecenderungan toleran/intoleran dan radikalisme.

### ***Kehadiran dan Keberfungsian Negara***

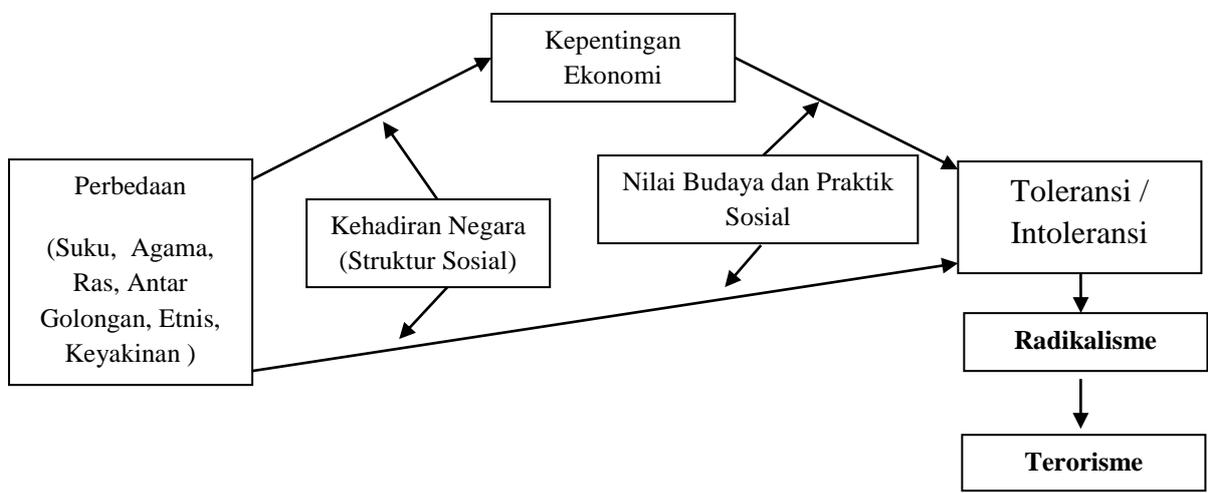
Di lapisan paling atas, kehadiran dan keberfungsian negara berperan sebagai faktor penting dalam kecenderungan toleran/intoleran dan radikalisme. Di Kabupaten Lamongan yang diteliti ditemukan peran kehadiran dan keberfungsian negara dalam gejala

toleran/intoleransi dan radikalisme. Peran negara yang diwakili pemerintah daerah dapat meningkatkan atau menurunkan gejala intoleransi dan radikalisme. Jika negara hadir dan menjalankan fungsi-fungsi yang efektif dan menjaga toleransi, maka kecenderungan toleran pada warga akan lebih besar. Peran negara yang dimaksud di sini adalah berikap netral dan tegas, bekerja sesuai payung hukum yang tidak diskriminatif, antisipatif dengan menyiapkan semacam sistem peringatan dini (*Early Warning System*) kepada warga, untuk menghindari dari kecenderungan intoleran dan radikal, serta mampu memediasi dan koordinasi. Gejala toleransi/intoleransi dan radikalisme disebabkan oleh lebih dari satu faktor yang secara bersama-sama bekerja. Dalam pencermatan terhadap empat kota yang diteliti, semua faktor itu bekerja bersama-sama dalam porsi tertentu dalam menghasilkan kecenderungan toleransi/intoleransi dan radikalisme. Skema berikut ini meringkas faktor-faktor yang sudah dipaparkan di atas.

Intoleran didefinisikan sebagai ketidaksediaan atau ketidakmauan untuk memberikan hak pada orang atau kelompok yang berbeda, baik berbeda dalam keyakinan, ideologi, status sosial, maupun etnik. Sedangkan radikalisme adalah keyakinan seseorang yang begitu tinggi terhadap satu paham atau nilai, yang membuat ia menutup kemungkinan benar paham-paham lain, disertai dengan pandangan bahwa yang lain salah, sehingga layak diabaikan, dihilangkan atau dihukum. Radikalisme juga dipahami sebagai intoleransi dalam bentuk ekstrem, disertai dengan kecenderungan untuk menggunakan kekerasan, yang ditujukan kepada orang atau kelompok yang berbeda paham. Berdasarkan pengertian-pengertian ini, dan hasil studi di Kabupaten Lamongan yang diteliti, dibangun satu model penjelasan mengenai toleransi/intoleransi, radikalisme hingga terorisme.

Model ini menjelaskan hubungan antara perbedaan keyakinan dan toleransi/intoleransi yang dimediasi oleh kepentingan ekonomi. Perbedaan keyakinan mempengaruhi toleransi/intoleransi bermuatan kepentingan ekonomi (termasuk juga kepentingan politik yang bertujuan memperoleh sumber daya ekonomi). Perbedaan keyakinan atau etnik saja tidak signifikan pengaruhnya terhadap toleransi/intoleransi. Dalam berbagai kasus intoleransi selalu ada peran faktor ekonomi di dalamnya, yang menghubungkan perbedaan keyakinan atau etnik dengan intoleransi. Hubungan ini dimoderasi oleh kehadiran negara. Tingkat kehadiran negara yang tinggi memperkuat hubungan antara perbedaan dan toleransi, serta memperkuat hubungan antara perbedaan dan kepentingan ekonomi.

Nilai budaya dan praktik sosial berperan sebagai moderator dalam hubungan antara kepentingan ekonomi dan toleransi/intoleransi, serta hubungan antara perbedaan dan toleransi/intoleransi. Seberapa kuat perbedaan menghasilkan kecenderungan toleransi/intoleransi ikut dipengaruhi oleh nilai budaya dan praktik sosial. Begitu juga seberapa kuat ketimpangan ekonomi mempengaruhi toleransi/intoleransi dipengaruhi oleh nilai budaya dan praktik sosial. Radikalisme merupakan hasil pengaruh dari intoleransi. Semakin intoleran seseorang, semakin besar kemungkinannya untuk menjadi radikal. Tidak semua orang yang intoleran adalah orang yang radikal, tetapi semua orang yang radikal, dalam pengertian menggunakan kekerasan untuk menghadapi orang atau kelompok yang berbeda, adalah orang yang intoleran. Skema berikut ini meringkas model hubungan antara faktor toleransi/intoleransi dan radikalisme.



Gambar .1. Proses Menuju Perilaku Intoleransi, Radikalisme dan Terorisme

Gejala toleransi/intoleransi dan radikalisme memiliki lebih dari satu sebab (*multicausal*). Seperti gejala sosial pada umumnya, tidak ada penyebab tunggal dari toleransi/intoleransi. Selain itu, bukan hanya keberadaan faktor tertentu saja yang memunculkan gejala toleransi/intoleransi, melainkan juga bagaimana hubungan antar faktor. Keberadaan semua faktor tersebut saja belum tentu memunculkan intoleransi atau radikalisme. Tanpa adanya hubungan yang signifikan antara faktor, gejala toleransi/intoleransi tidak muncul. Guna dapat memahami gejala toleransi/intoleransi dan radikalisme dibutuhkan analisis komprehensif, terhadap faktor-faktornya serta pencermatan terhadap hubungan antara faktor-faktor itu.

Meskipun ada banyak faktor yang berperan dalam munculnya gejala toleransi/intoleransi dan radikalisme, berdasarkan model yang dihasilkan studi ini, ada faktor yang dapat dikenali sebagai faktor yang mendahului yang lain. Ada perbedaan keyakinan, etnik, status sosial ekonomi, dan sebagainya menjadi gejala awal yang berpotensi menghasilkan gejala toleransi/intoleransi dan radikalisme. Namun, seperti yang diketahui bersama, perbedaan itu seringkali merupakan situasi yang terberi dan tak terhindarkan. Juga perlu dipahami bahwa perbedaan itu tidak serta merta menghasilkan intoleransi apalagi radikalisme. Ada kepentingan ekonomi yang berperan menghubungkan perbedaan dengan intoleransi, yang jika semakin menguat nantinya dapat menghasilkan pula radikalisme.

Di sisi lain ada peran kehadiran negara, yang dapat mengurangi atau menguatkan peran kepentingan ekonomi dalam menghasilkan intoleransi. Kehadiran negara juga berperan dalam memperkuat hubungan antara perbedaan dan intoleransi. Faktor kehadiran Negara menjadi penting dalam konteks ini dan lebih dapat dikendalikan dari pada faktor perbedaan. Hadirnya negara menjadi faktor yang dapat diupayakan. Jika negara dapat menjalankan fungsinya dalam arti bersikap netral dan tegas, bekerja sesuai payung hukum yang tidak diskriminatif, antisipatif dengan menyiapkan semacam sistem peringatan dini kepada warga, maka kecenderungan intoleran dan radikal dapat dihindari dan dihilangkan. Negara yang mampu memediasi dan mengkoordinasi para pihak di masyarakat menjadi kunci penting bagi munculnya toleransi. Peran negara juga penting untuk menjaga agar kepentingan ekonomi tidak membuat perbedaan menjadi faktor yang meningkatkan kecenderungan intoleransi dan radikalisme.

Jika nilai budaya dan praktik sosial yang sejalan dengan toleransi kuat, maka intoleransi dan radikalisme juga dapat dihambat. Sebaliknya, jika nilai budaya dan praktik sosial memfasilitas menguatnya persepsi akan perbedaan dan petentangan kepentingan ekonomi, maka intoleransi dan radikalisme cenderung menguat. Tetapi, peran nilai budaya dan praktik sosial akan lebih kecil, jika sedari awal kehadiran negara berperan optimal dan berfungsi untuk menghindarkan warga dari sikap menjadikan perbedaan dan kepentingan ekonomi, sebagai penyebab intoleransi dan radikalisme. Merujuk pada model ini, dalam upaya mendorong masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang toleran, kehadiran negara perlu diupayakan untuk mencegah terjadinya intoleransi dan radikalisme. Sebaliknya, jika negara justru mendukung atau membiarkan kecenderungan dan praktik intoleransi berjalan,

maka kemungkinan terjadinya tindakan intoleran sangat besar. Begitu pula dengan gejala radikalisme, kehadiran negara menjadi faktor yang besar pengaruhnya.

## KESIMPULAN

Hasil kajian di Kabupaten Lamongan ini memberikan pemahaman mengenai faktor apa saja yang secara signifikan mempengaruhi perspektif dan perilaku warga terkait perilaku intoleransi, radikalisme dan terorisme. Faktor yang berperan itu mencakup demografi, latar belakang budaya dan politik, afiliasi dan asosiasi, kebijakan, Nilai, Ideologi, makna agama, akses terhadap media sosial. Hubungan antara faktor-faktor toleransi/intoleransi dan radikalisme dapat dilihat berdasarkan letak faktor-faktor itu dalam lapisan sosial, mulai dari nilai yang tercakup dalam budaya hingga faktor struktural, yang mencakup kebijakan dan keberfungsian negara.

Di lapisan dasar, nilai budaya dan praktik sosial berperan dalam menghasilkan kecenderungan toleran/intoleran dan radikal. Di lapisan berikutnya, kondisi perekonomian berperan dalam menghasilkan kecenderungan toleran/intoleran dan radikal. Lalu, faktor keragaman sumber norma ikut berperan dalam kecenderungan toleransi/intoleransi dan radikalisme ada di lapisan berikutnya. Di lapisan berikutnya lagi, faktor pengaruh tokoh yang signifikan dan dianggap penting oleh warga turut berperan terhadap kecenderungan toleran/intoleran dan radikalisme. Di lapisan paling atas, kehadiran dan keberfungsian Negara berperan sebagai faktor penting dalam kecenderungan toleran/intoleran dan radikalisme.

Perbedaan keyakinan mempengaruhi toleransi/intoleransi bermuatan kepentingan ekonomi (termasuk juga kepentingan politik, yang bertujuan memperoleh sumber daya ekonomi). Perbedaan keyakinan atau etnik saja tidak signifikan pengaruhnya terhadap toleransi/intoleransi. Nilai budaya dan praktik sosial berperan sebagai moderator dalam hubungan antara kepentingan ekonomi dan toleransi/intoleransi, serta hubungan antara perbedaan dan toleransi/intoleransi. Radikalisme merupakan hasil pengaruh dari intoleransi. Semakin intoleran seseorang, semakin besar kemungkinannya untuk menjadi radikal. Gejala toleransi/intoleransi dan radikalisme memiliki lebih dari satu sebab (*multicausal*). Seperti gejala sosial pada umumnya, tidak ada penyebab tunggal dari toleransi/intoleransi. Meskipun demikian, berdasarkan model yang dihasilkan studi ini, ada faktor yang dapat dikenali sebagai faktor yang mendahului yang lain.

Kepentingan ekonomi yang berperan menghubungkan perbedaan dengan intoleransi, yang jika makin menguat nanti dapat menghasilkan pula radikalisme. Di sisi lain ada peran

kehadiran negara, yang dapat mengurangi atau menguatkan peran kepentingan ekonomi dalam menghasilkan intoleransi. Kehadiran Negara juga berperan dalam memperkuat hubungan antara perbedaan dan intoleransi. Jika nilai budaya dan praktik sosial yang sejalan dengan toleransi kuat, maka intoleransi dan radikalisme juga dapat dihambat, dan sebaliknya. Tetapi, peran nilai budaya dan praktik sosial akan lebih kecil jika sedari awal kehadiran Negara berperan optimal dan berfungsi untuk menghindarkan warga, untuk menjadikan perbedaan dan kepentingan ekonomi sebagai penyebab intoleransi dan radikalisme. Untuk dapat mendorong masyarakat Indonesia agar menjadi masyarakat yang toleran, kehadiran negara perlu diupayakan untuk mencegah terjadinya intoleransi dan radikalisme. Sebaliknya, jika negara justru mendukung atau membiarkan kecenderungan dan praktik intoleransi berjalan, maka kemungkinan terjadinya tindakan intoleran sangat besar. Itu berlaku juga pada gejala radikalisme.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2017. *Terorisme di Indonesia*, [http://id.wikipedia.org/wiki/Terorisme di Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Terorisme_di_Indonesia), diakses 20/04/2017, 20:39 WIB.
- Awwas, Irfan S. (ed.). 2001. *Risalah Kongres Mujahidin dan Penegakan Syari'ah Islam*. Yogyakarta: Wihdah Press.
- Ba'asyir, Abu bakar. 2001. "Sambutan Ketua Ahlul Halli wal Aqdi: Seruan ke Arah Tathbiqus Syari'ah," dalam Irfan S. Awwas (ed.), *Risalah Kongres Mujahidin dan Penegakan Syari'ah Islam*. Yogyakarta: Wihdah Press.
- Fadjar, Abdullah dkk. 2007. *Laporan Penelitian Islam Kampus*. Jakarta : Ditjen Dikti Depdiknas.
- Hamdi, Ahmad Zainul. 2012. "Klaim *Religious Authority* dalam Konflik Sunni-Syi'i Sampang Madura, *Islamica*, Vol. 6, No. 2 (Maret 2012), 215-231.
- Hefner, Robert W. 2005. "Muslim Democrats and Islamist Violence in Post-soeharto Indonesia," dalam Robert W. Hefner (ed.), *Remaking Muslim Politics: Pluralism, Contestation, Democratization*. Princeton and Oxford: Princeton University Press.
- Marsh, David dan Gerry Stoker. 2002. *Theory and Methods in Political Science*. Hampshire: Palgrave Macmillan.

- Prasetyo, Stanley Adi. A.E. Priyono, Olle Torrnuist. 2003. "Demokrat Mengambang," dalam Stanley Adi Prasetyo, A.E. Priyono, Olle Torrnuist (eds.), *Gerakan Demokrasi di Indonesia Pasca-Soeharto*. Jakarta : Demos.
- Sholeh, Badrus. 2017. *Dari JI ke ISIS: Pemikiran Strategis dan Taktis Gerakan Terorisme di Asia Tenggara*, Jurnal Hubungan Internasional, Vol. 5 Edisi 2 / Oktober 2016-Maret 2017. Hal. 210-221.
- Suaedy, Ahmad. 2007. Agama dan Kekerasan Kolektif: Dilema Islam Indonesia Mengarungi Transisi Demokrasi," dalam Rumadi & Ahmad Suaedy (eds.), *Politisasi Agama dan Konflik Komunal: Beberapa Isu Penting di Indonesia*. Jakarta: Wahid Institute.
- Sukma, Rizal. 2005. "Ethnic Conflict in Indonesia: Causes and the Quest for Solution," dalam Kusuma Snitwongse & W. Scott Thompson eds.), *Ethnic Conflict in Souteast Asia*. Singapura: ISEAS.
- Takwin, Bagus, dkk. 2016. *Studi Tentang Toleransi dan Radikalisme di Indonesia, Pembelajaran dari 4 Daerah Tasikmalaya, Yogyakarta, Bojonegoro, dan Kupang*. Jakarta, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID).
- Tim CMARs. 2010. *Ringkasan Eksekutif Berdamai dengan Kekerasan (Fakta Tindakan Intoleransi dan Pelanggaran Hak Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Jawa Timur 2010)*. Jakarta : CMARs.
- Ulfiyatin, Anis. 2015. *Makna menjadi keluarga 'teroris' bagi keluarga tersangka terorisme Amrozi dan Ali Ghufron di Desa Tenggulun, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* Vol. 28, No. 2, tahun 2015, hal. 70-79.